

# Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Ketimpangan Kemiskinan pada Kabupaten Pangkep sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals Pilar tanpa Kemiskinan

Andi Ahmad Bilal Abbas<sup>1</sup>, Mulawarman<sup>2</sup>, Chelsea Anya Ulfienovoa Pawai<sup>3</sup>, Stevany Natalia Susanto<sup>4</sup>, Andi Widya Sari<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Universitas Andi Sudirman, Bone, Indonesia, Indonesia

<sup>1,3,4,5</sup> Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

## ARTICLE INFORMATION

Vol. 13, No. 01

Page :

Published : 2025

## KEYWORDS

Kemiskinan, Pemuda, Pemberdayaan UMKM, Literasi Keuangan, Pangkep, Pariwisata Pesisir, Pembangunan Inklusif

## CORRESPONDENCE

Phone: +628

E-mail: [andibilalabbas@gmail.com](mailto:andibilalabbas@gmail.com)

## A B S T R A C T

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) merupakan salah satu wilayah pesisir di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, namun masih menghadapi tantangan serius dalam mengatasi ketimpangan dan tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS tahun 2024, Pangkep tercatat sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 12,41%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan dan merumuskan peran strategis pemuda dalam penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan pembangunan yang lebih berkeadilan dan inklusif di Pangkep. Melalui pendekatan deskriptif kuantitatif dan wawancara dengan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif, terbatasnya akses pendidikan, distribusi pembangunan yang belum merata, dan lemahnya pemberdayaan ekonomi lokal menjadi penyebab utama tingginya kemiskinan. Solusi yang ditawarkan antara lain peningkatan mutu pendidikan, pemberdayaan UMKM, literasi keuangan, pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi pesisir, dan kolaborasi multipihak. Pemuda sebagai agen perubahan memiliki peran vital dalam mendorong transformasi sosial dan ekonomi melalui inovasi digital, partisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan langsung dalam program pembangunan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan, diharapkan Pangkep dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan dan menjadi kabupaten yang lebih mandiri.

## INTRODUCTION

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu daerah yang ada di Sulawesi Selatan yang memiliki luas kawasan pesisir sebesar 781,13 Kilometer persegi atau 70% dari luas daratan, dengan panjang garis pesisir sepanjang 95 Kilometer (Zainudin et al., 2015). Kabupaten Pangkep, sebagai bagian

integral dari wilayah Sulawesi Selatan, dihadapkan pada tantangan kompleks dalam pembangunan, salah satunya adalah isu kemiskinan (Ilham, 2020). Meskipun berbagai upaya pembangunan telah diimplementasikan, disparitas tingkat kemiskinan antar wilayah di dalam kabupaten ini masih menjadi perhatian serius.

Ketidaksetaraan kemiskinan adalah jenis ketidakmerataan kesejahteraan yang mencerminkan perbedaan antara satu area dan area lainnya dalam suatu wilayah administrative (Ihsani et al., 2022). Walaupun berbagai inisiatif pembangunan telah diterapkan oleh pemerintah baik dari tingkat pusat maupun daerah, masih terlihat adanya ketidakmerataan yang signifikan dalam tingkat kemiskinan di kecamatan-kecamatan kabupaten pangkep (Rahmah et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi semata melainkan dapat mencangkup aspek sosial geografis dan kebijakan public (Maharani et al., 2024).

Kemiskinan mengacu pada kondisi individu atau kelompok yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Seseorang atau keluarga dianggap hidup dalam kemiskinan jika tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kebutuhan dasar lainnya (Sinurat, 2023). Badan Statistika Nasional (BPS) menyatakan bahwa angka kemiskinan menjadi salah satu permasalahan di Indonesia, yang masih menjadi tantangan hingga saat ini. Dalam penyelesaiannya, kemiskinan dapat menimbulkan masalah lain, seperti pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Selain itu, akses untuk mendapatkan pekerjaan juga memengaruhi tingkat kemiskinan. (Ferezagia, 2018). Penanganan kemiskinan perlu menjadi perhatian utama karena kemiskinan berpotensi menghambat akses masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pendidikan (Purwanti, 2024).

Fenomena ketimpangan kemiskinan tidak hanya menghambat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga menjadi kendala signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama pilar pertama yaitu "Tanpa Kemiskinan" (Sarjito, 2023). Pilar ini mengamanatkan penghapusan segala bentuk

kemiskinan di mana pun. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan kemiskinan di Kabupaten Pangkep menjadi krusial. Analisis komprehensif terhadap aspek ekonomi, sosial, geografis, dan kebijakan diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi perumusan strategi dan intervensi yang lebih efektif dan terarah dalam upaya mencapai target SDGs, khususnya dalam memberantas kemiskinan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pangkep.

## THEORETICAL FRAMEWORK

Penelitian ini menggunakan kerangka teori pembangunan dan kemiskinan untuk menjelaskan ketimpangan kemiskinan di Kabupaten Pangkep. Teori pembangunan inklusif menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Namun, pada kenyataannya, pertumbuhan yang tidak merata dapat melahirkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang persisten. Selanjutnya, teori Human Capital (Becker, 1993) menyoroti pentingnya pendidikan dan keterampilan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya akses pendidikan di wilayah pesisir Pangkep memperkuat lingkaran kemiskinan. Selain itu, pendekatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pilar pertama yaitu No Poverty menjadi kerangka global yang relevan, dimana pengentasan kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, geografis, dan kebijakan publik (UNDP, 2015).

Dengan mengacu pada teori-teori tersebut, penelitian ini memandang bahwa ketimpangan kemiskinan di Pangkep tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi yang tidak inklusif, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya pemberdayaan lokal. Oleh karena itu, strategi pemberantasan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas

pendidikan, pemberdayaan ekonomi berbasis lokal, serta kolaborasi multi-stakeholder untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

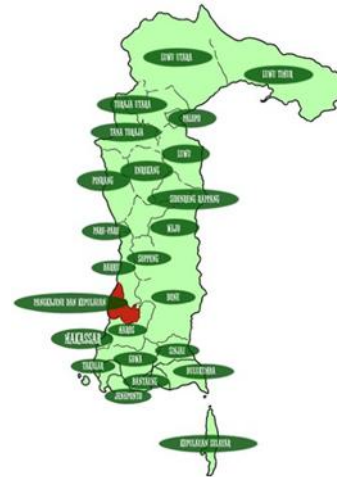
**METHOD**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis kondisi kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) berdasarkan data tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data meliputi persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin dalam ribuan jiwa, serta total jumlah penduduk. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dari situs resmi BPS. Proses analisis dilakukan secara kuantitatif deskriptif dengan menelaah persentase dan jumlah penduduk miskin di Pangkep, membandingkannya dengan data dari tahun-tahun sebelumnya, serta meninjau posisi Kabupaten Pangkep dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan. Kredibilitas data dijamin karena menggunakan data resmi dari BPS, dan penelitian tersebut dilaksanakan pada Mei 2025 di wilayah Kabupaten Pangkep.

**RESULT AND DISCUSSION**

Hasil yang diperoleh dari observasi dan telaah literatur mengenai angka kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan per Mei 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Pangkep tercatat sebesar 12,41%, menjadikannya sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Angka ini mengindikasikan bahwa lebih dari satu dari sepuluh penduduk di Pangkep masih hidup di bawah garis kemiskinan dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Persentase tersebut jauh di atas rata-rata provinsi dan menggambarkan adanya ketimpangan yang cukup besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan.



Gambar 01. Peta Provinsi Sulawesi Selatan  
Sumber: Data Primer yang Diilustrasikan Sendiri

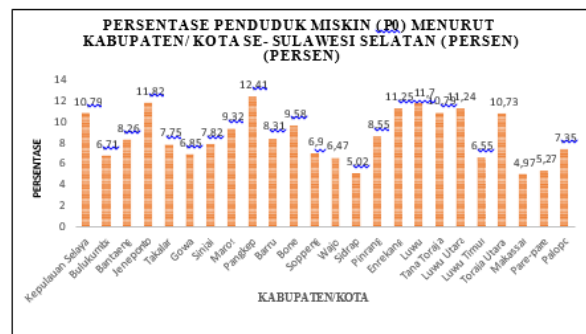


Diagram 01. Presentase Kabupaten Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan  
Sumber: (Badan Statistika Provinsi Sulawesi Selatan)



Gambar 01. Barcode wawancara bersama ketua forum anak saudara pangkep

Hasil yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Yayasan nurhidayat selaku ketua forum anak saudara pangkep, yang

mewakili aspirasi anak dan remaja kabupaten pangkep menyatakan bahwa, kabupaten pangkajene dan kepulauan memerlukan revormasi yang besar-besaran dalam mewujudkan kabupaten pangkajene yang lebih unggul dan maju. Selain pemerintah yayat mengatakan bahwa para pemuda dan generasi penerus bangsa harus ikut serta dalam pembangunan daerah dan kemajuan pangkep, yayat sangat berharap agar semua masyarakat ikut serta ambil dalam meningkatkan sumber daya manusi yang unggul, harapan yayat ini memberikan semangat yang luar biasa untuk dapat membabangun daerah kabupaten pangkep, melalui gerakan agen perubahan, yayat mengatakan bahwa, sebagai penerus pilar kepemimpinan masa depan, diperlukannya kebersamaan untuk membangun serta menumbuhkan rasa saling peduli tiap antar masyarakat yang ada, semua memiliki peranan penting dan tanggung jawab dalam mewujudkan kabupaten pangkpe yang lebih maju.

#### **SEHINGGA SOLUSI YANG DITAWARKAN DARI HASIL OBSERVASI**

Sebagai seorang pemuda, saya meyakini bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan Kabupaten Pangkajene (Pangkep), Peran pemuda dalam memberantas kemiskinan sangat penting karena mereka merupakan agen perubahan yang dapat mendorong pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Pemuda dapat berkontribusi melalui pemberdayaan ekonomi, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan jaringan sosial (social capital) yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Misalnya, intervensi berbasis komunitas seperti pemberdayaan kelompok perempuan dan penggunaan teknologi digital untuk memantau program secara real-time dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan. Melibatkan pemuda dalam

perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan agar program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, pemuda dapat menjadi motor penggerak dalam mengatasi kemiskinan secara holistik dan berkelanjutan (Akib et al., 2025). Menjadi agen perubahan yang aktif dalam pemberdayaan ekonomi, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan jaringan sosial (Kholis dan Gunarto, 2025). Upaya menurunkan angka kemiskinan masyarakat Pangkep adalah dengan meningkatkan literasi keuangan melalui program "Pemuda Mengajar" untuk anak-anak di daerah terpencil di Pangkep dan workshop kecil-kecilan mengenai literasi keuangan untuk memfasilitasi masyarakat terkait pengelolaan keuangan dari penghasilan yang diperoleh melalui UMKM. Peningkatan pengetahuan mengenai literasi keuangan memberi dampak positif bagi individu karena banyaknya permasalahan seperti utang berlebih dan penipuan dapat menyengsarakan masyarakat sehingga literasi keuangan penting untuk diketahui (Dwitri dan Pradikto, 2025).

Pemahaman mengenai literasi keuangan sangat penting agar masyarakat, khususnya daerah Pangkep, dapat mengatur keuangannya secara bijak, terhindar dari kesalahan pengelolaan keuangan, dan membiasakan diri dalam kehidupan finansial yang positif (Karepesina, 2024). Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan mengenai literasi keuangan bagi masyarakat Pangkep merupakan langkah awal yang baik untuk setidaknya mengurangi angka kemiskinan di daerah Pangkep. Pengembangan pariwisata berkelanjutan. Seperti yang telah diketahui, kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terbagi menjadi dua bagian, yaitu daratan dan kepulauan (Latumahina et al., 2019). Hal tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan di daerah Pangkep. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat meningkatkan

devisa negara sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk memakmurkan dan menurunkan angka kemiskinan di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Rahma, 2020).

Hal yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan item kearifan lokal dalam dalam sektor pariwisata. Misalnya saja di desa Mattiro Bombang, masyarakat dapat memberikan pengetahuan mengenai cara menjala ikan, membuat kuliner tradisional Pangkep, dan juga belajar tradisi lokal dari masyarakat di sana yang dapat dikemas dalam satu paket wisata. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendapatkan penghasilan, tetapi juga dapat memperkenalkan budaya Pangkep ke masyarakat luar maupun turis. Untuk memberantas kemiskinan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi ini penting karena dapat meningkatkan produksi barang dan jasa serta kemakmuran masyarakat, sehingga secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan.

Jika sebuah negara ingin mengentaskan kemiskinan, maka pertumbuhan ekonomi harus menjadi prioritas utama karena kemiskinan erat kaitannya dengan rendahnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (Siswantoro dan Gandhi, 2025). Selain itu, penting untuk meningkatkan produktivitas dan investasi guna memutus lingkaran kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan rendahnya produktivitas, yang kemudian menurunkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemampuan mereka untuk menabung dan berinvestasi. Akibatnya, modal menjadi rendah dan pasar menjadi tidak sempurna, sehingga kemiskinan terus berlanjut tanpa ada awal dan akhirnya. Oleh karena itu, dengan meningkatkan produktivitas dan investasi, diharapkan dapat memutus siklus tersebut dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Mingsih et al., 2023). Pengembangan sektor pertanian juga menjadi kunci dalam pemberantasan kemiskinan,

terutama di berbagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak (Montolalu et al., 2024). Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki sumber daya alam melimpah dan lahan subur. Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional karena dapat memberdayakan masyarakat, membuatnya sangat strategis dalam memanfaatkannya. dan memanfaatkan hasil-hasil strategis, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pangan. Dengan mengembangkan sektor ini, kesejahteraan masyarakat terutama di daerah pedesaan dapat meningkat secara signifikan (Anandar, 2022).

Setelah dilakukan analisis mendalam, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, memiliki potensi tambak yang melimpah, sehingga pemanfaatan pada sektor tambak sangat diperlukan. Potensi tambak memiliki peran penting dalam mengupayakan pemberantasan kemiskinan karena dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kebutuhan pangan yang meningkat dan harga pasar yang tinggi memberikan peluang investasi dalam pengelolaan tambak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani tambak. Selain itu, komoditi tambak seperti udang vannamei yang memiliki pertumbuhan cepat dan harga yang bervariasi dapat mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Dukungan dari dinas perikanan dalam pemasaran hasil budidaya juga memperkuat potensi ini (Wahdania et al., 2025).

## KESIMPULAN

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Inklusif  
Meskipun Kabupaten Pangkep menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama dari sektor industri pengolahan seperti semen, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Mayoritas penduduk masih bergantung pada sektor pertanian yang memberikan upah lebih rendah, sehingga ketimpangan pendapatan tetap tinggi.

## 2. Keterbatasan Akses Pendidikan dan Keterampilan

Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat, khususnya di daerah pesisir seperti Kecamatan Labakkang, membatasi akses mereka terhadap pekerjaan di sektor industri dan jasa yang lebih produktif. Hal ini memperkuat siklus kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi.

## 3. Distribusi Pembangunan yang Tidak Merata

Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, meninggalkan daerah-daerah lain, terutama wilayah pesisir dan kepulauan, dalam kondisi tertinggal. Ketimpangan ini memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah-daerah tersebut.

## 4. Keterbatasan Investasi dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Kurangnya investasi yang merata dan minimnya program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti dukungan terhadap UMKM dan ekonomi kreatif, menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Pangkep.

## REFERENSI

### Books:

- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). Chicago: The University of Chicago Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2015). *Sustainable Development Goals (SDGs)*. New York: United Nations

### Serial/journal article (print):

- Akib, F. H. Y., Novriansyah, M. A., Wolok, E. (2025). *DINAMIKA KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO: TREN, TANTANGAN, DAN STRATEGI*

- PENANGGULANGAN 2012–2022. JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 7(3), 1203-1215.

- Anandar, A. A. (2022). Analisis Korelasi Sektor Pertanian Terhadap Persentase Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten Jepara. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 20(1), 53-64.

- Dwitri, A. dan Pradikto, S. (2025). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 3(1), 99-106.

- Endang, P. (2024). Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 1-10.

- Fahresi, H., Mubarak, M. S. (2025). Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Perdesaan. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial*, 4(02).

- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1 (1), 1-6.

- Ihsani, S. F., & Rohman, M. F. (2022). Distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia: Kasus kebijakan sentralisasi, desentralisasi, dan pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi- Qu*, 12(1), 1-22.

- Ilham, M. (2020). Strategi Komunikasi Sekolah Perempuan Dalam Meningkatkan Kapasitas Perempuan Miskin Di Wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Jurnal Ilmu Komunikasi Network Media*, 3(2), 16-23.

- Karepesina, F. H. (2024). Sosialisasi Pentingnya Literasi Keuangan di Era Society 5.0 Bagi Kalangan Remaja. *Pattimura Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 173-176.

- Kholis, F. N., dan Gunarto, T. (2025). Analisis Pengaruh Kesenjangan Sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung (2012-2023). *eCo-Buss*, 7(3), 2128-2142.

- Latumahina, P. F., Asri, S., dan Chaerunnisa, A. S. (2019). Pola Jaringan Angkutan Laut Gugusan Pulau dalam Wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan. *Jurnal JPE*, 23(2), 195-207.
- Maharani, C., Ningrum, D. A., Fatmawati, A. E., & Fadilla, A. (2024). Dampak kemiskinan terhadap kualitas pendidikan anak di Indonesia: Rekomendasi kebijakan yang efektif. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1-10.
- Montolalu, M. H., Tangkere, E. G., Timban, J. F. J., Kaban, M. A. (2024). Analisis Sektor Pertanian dan Kemiskinan Studi Kasus Prevalensi Stunting di Sulawesi Utara. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(2), 393-407.
- Ningsih, M., Nursini, N., Sabir, S. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Inflasi dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Pulau Sulawesi. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 362-372.
- Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1-8.
- Rahmah, M., Suarni, A., & Nasrullah, N. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Kantor Camat Liukang Kalmas Kab. Pangkep. *Journal Of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(1), 1103-1108.
- Sarjito, A. (2023). Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 6(2), 1-12.
- Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87-103.
- Siswantoro, A., dan Gandhi, E. A. (2025). Dinamika Pertumbuhan Ekonomi, Kepadatan Penduduk, dan Peran Sektor Pertanian dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Ecoplan*, 8(1), 1-15.
- Wahdaniyah, W., Ruslang, T., Bahruddin, B. (2025). STRATEGI PENGEMBANGAN PERIKANAN TAMBAK SEBAGAI SUB SEKTOR PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN SUPPA. *Cateris Paribus Journal*, 5(1), 11-22.
- Zainudin, Sumardjo, Susanto, D. (2015). Perilaku Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penyuluhan*, 11(1), Maret, 91-100.